

MODA PRODUKSI MULTI SUKU DALAM PENGELOLAAN SUMBER-SUMBER AGRARIA¹

Endriatmo Soetarto

KERANGKA PEMIKIRAN

Persoalan pembentukan entitas sosial multi suku, khususnya pada desa-desa 'baru' yang dibentuk dalam rangka program transmigrasi antar pulau maupun transmigrasi lokal (translok), seringkali menimbulkan potensi friksi bahkan konflik sosial. Studi mengenai hal ini telah banyak dilakukan, antara lain karya klasik Kampto Utomo (1958), dimana dalam tulisan tersebut yang disoroti lebih menyangkut proses adaptasi warga transmigran spontan suku Jawa di Lampung. Mengapa menarik?, karena dalam konteks desa-desa transmigrasi di Indonesia persoalan tersebut mengikutsertakan pula perihal perbedaan moda produksi (*mode of production*) yang dibawakan oleh masing-masing suku yang menjadi warga baru. Pada gilirannya perbedaan moda produksi berimplikasi terhadap berhasil tidaknya proses pembentukan entitas sosial baru (komunitas desa) itu sendiri secara sosiologis².

Dengan kata lain kebijakan pemerintah yang langsung atau tidak langsung turut mempertahankan terpeliharanya sekat-sekat perbedaan moda produksi dalam pengelolaan sumber-sumber agraria lokal oleh masing-masing suku maka ia berpotensi menguatkan eksklusivisme suku-suku yang bersangkutan. Sebaliknya kebijakan yang memberi peluang untuk proses saling belajar dan membuka diri antar warga suku yang berbeda dalam pengelolaan sumber-sumber agraria dapat menciptakan ruang bagi pembentukan moda produksi baru (formasi sosial) yang akomodatif³. Hal terakhir ini penting bagi penciptaan 'stabilitas lingkungan' (*stabilization of environment*). Lingkungan yang dimaksudkan di sini mencakup aspek hubungan-hubungan sosial antar suku dan aspek ekosistem biofisik di wilayah lokal.

Atas pemahaman itu dapat kita rumuskan hipotesis pengarah sebagai berikut: makin 'stabil lingkungan' berarti semakin demokratis hubungan-hubungan sosial lintas suku dan semakin terdistribusi 'merata' alokasi penguasaan sumber-sumber agraria

sehingga peluang keberlanjutan fungsi-fungsi ekologis biofisik makin terbuka. Sebaliknya, makin 'instabil lingkungan' maka semakin asimetris hubungan-hubungan sosial antar suku dan semakin tinggi ketimpangan alokasi penguasaan sumber-sumber agraria, dan pada gilirannya mengancam degradasi kualitas ekologis biofisik lokal. Hal yang terakhir ini terjadi karena suku-suku yang termarginalisasi akan menguatkan arus tekanan atas lingkungan fisik termasuk yang dialokasikan untuk pemeliharaan dan kelangsungan fungsi-fungsi ekosistem (lihat puia Lounela dan Zakaria 2002).

Berkaitan dengan tulisan ini, yang hendak digambarkan adalah sejauh manakah kelompok-kelompok suku yang dipindahkan pemerintah (program translok) di desa-desa baru pinggiran kawasan Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) Provinsi Sulawesi Tengah sejak beberapa dasawarsa tahun yang lalu berhasil membangun dirinya menjadi komunitas desa yang penting untuk penciptaan formasi sosial yang 'stabilitas lingkungan'? Bagaimana kebijakan pemerintah dan proses-proses sosial di tataran komunitas desa menyumbang atau tidak pada penguatan kesejahteraan komunitas lokal dan keberlanjutan fungsi-fungsi ekologis di tingkat lokal.

METODOLOGI

Studi ini mengambil lokasi di dua desa masing-masing di Sintuwu dan Berdikari, Kecamatan Palolo, Provinsi Sulawesi Tengah. Kedua desa ini diambil dengan alasan desa Sintuwu mencerminkan tipe desa 'asli' karena suku Kaili yang menjadi mayoritas warga didalamnya datang dari wilayah terdekat, yaitu dari bagian dalam lembah Palolo. Sementara desa Berdikari merupakan tipe 'desa pendatang' karena berdasarkan komposisi penduduk lebih banyak diisi kelompok suku yang berasal dari luar wilayah Palolo, bahkan dari luar pulau Sulawesi (Jawa dan Sunda).

Studi ini bersifat studi kasus (*case study*) karena bertujuan menyoroti secara rinci dan mendalam moda produksi pada tiap-tiap kelompok suku yang ada di kedua desa. Studi yang bertautan dengan praktik-praktik mereka mengelola sumber-sumber agraria yang di dalamnya terdapat ladang dan kebun (lahan kering), sawah (lahan basah), dan hutan. Pada tingkat berikutnya yang dianalisis adalah sejauhmana warga masing-masing kelompok-kelompok suku tersebut mengembangkan interaksi kolektif dalam memilih cara mengelola sumber-sumber agraria. Apakah yang berkembang berupa interaksi resiprokal mutualistik yang biasa dikenal dalam moda produksi 'subsisten' seperti dicerminkan oleh 'suku asli' atau sebaliknya yang dominan adalah moda produksi 'komersial' atau bahkan 'kapitalis' yang umumnya dibawa oleh suku-suku 'pendatang'.

Dalam upaya mengumpulkan data, kegiatan mata pencarian sehari-hari dan sejumlah peristiwa adat di sekitar rumahtangga (*life cycle rites*) ditempatkan sebagai titik pengamatan terpenting karena dinilai strategis untuk menjelaskan kekuatan dan hubungan produksi yang terdapat di dalamnya dan dengan segala implikasinya di

aras kehidupan kolektif. Pengamatan berikutnya diarahkan pada upaya menggali informasi dan menganalisis sejauh mana kegiatan mata pencarian hidup, penyelenggaraan peristiwa-peristiwa adat tersebut, dan peristiwa-peristiwa hari besar nasional dan keagamaan, mampu berfungsi atau tidak sebagai jembatan bagi proses-proses interaksi lintas suku yang penting bagi pembentukan sentimen kolektif berskala desa. Pada gilirannya ingin diketahui apakah dengan tumbuh/tidaknya 'sentimen kolektif' memberi implikasi terhadap proses pembentukan suatu moda produksi dominan atau formasi sosial yang berciri 'stabil' atau sebaliknya 'instabil'.

TIPE KOMUNITAS SOSIAL DESA SINTUWU DAN DESA BERDIKARI

Desa Sintuwu dan desa Berdikari terletak pada ketinggian 500-700 meter di atas permukaan laut. Kedua desa ini merupakan dua desa di antara 21 desa lain yang berada di lingkungan kecamatan Palolo. Kedua desa ini berbatasan langsung dengan areal kawasan hutan. Desa Sintuwu berbatasan dengan kawasan hutan TNLL, sedangkan desa Berdikari sebagian berbatasan dengan hutan produksi terbatas dan sebagian lain dengan hutan lindung.

Dapat dicatat kedua desa ini mencerminkan tipe komunitas di mana terjadi percampuran penduduk antar beragam kelompok suku baik yang datang dari program permukiman kembali (*resettlement*) yang diselenggarakan pemerintah maupun dari proses migrasi swakarsa (*spontan*). Selain itu di kedua desa dijumpai pula lahan-lahan yang dibagi-bagikan pemerintah kepada sejumlah instansi pemerintah, seperti Universitas Tadulako, Korem (militer), kantor kas negara, kantor pengadilan, dan lainnya.

Penduduk desa Sintuwu berdasarkan pencatatan dari masing-masing kepala dusun tahun 2001 berjumlah 1205 jiwa, sementara desa Berdikari 1782 jiwa. Adalah menarik mengamati jumlah penduduk berdasarkan komposisi sub etnik (suku). Di desa Sintuwu suku Kaili Taa dan Kaili Tara sekitar 53 %, Bugis 29 % dan sisanya suku lain-lain. Sementara di desa Berdikari suku Kulawi menduduki jumlah terbanyak sekitar 55 % diikuti oleh Bugis 25 %, lainnya 20 %.

LATAR BELAKANG MASUKNYA PENDUDUK BERBAGAI KELOMPOK SUKU KE DESA

Adalah menarik untuk mengungkap asal mula proses migrasi kelompok-kelompok suku dan pembentukan desa baru di Sintuwu dan Berdikari. Kedua desa ini memiliki sejarah yang hampir sama karena merupakan desa hasil bentukan arus migrasi masuk (*in-migration*) spontan dari desa atau kecamatan yang berdekatan bahkan lebih jauh lagi dari luar provinsi serta pulau lain (yaitu orang Sunda, Jawa, dan Bali).

Pada awalnya desa Sintuwu memang terbentuk oleh penduduk yang dipindah paksa oleh pemerintah daerah pada tahun 1961 dari sebuah wilayah pegunungan di kecamatan Biromaru yang relatif tak jauh dengan desa Sintuwu. Pengusiran itu dilatarbelakangi alasan bahwa daerah pegunungan tersebut telah berada dalam kondisi kritis oleh sebab praktek berladang berpindah yang mereka lakukan, sehingga menggunduli wilayah tersebut. Gelombang kedua menyusul empat bulan kemudian masih pada tahun yang sama. Tahun 1963 merupakan puncak perpindahan penduduk dari desa asal karena pengusiran oleh aparat pemerintah makin menjurus pada kekerasan, seperti melakukan pembakaran rumah penduduk yang masih bertahan di desa setempat.

Masuknya orang Bugis berawal tahun 1968 yang disusul dengan masuknya pula lembaga penyiaran agama (Zending) tahun 1969. Zending langsung membeli tanah untuk membangun gereja dan saat ini kegiatan keagamaan mereka praktis sudah merata ke seluruh penduduk di desa Sintuwu. Periode penting perkembangan penduduk dimulai tahun 1970an sewaktu banyak orang berbondong-bondong mengikuti jejak orang terdahulu. Desa Sintuwu mulai menjadi desa heterogen dengan mulai banyaknya orang Bugis dan orang Kulawi. Orang Bugis datang dengan alasan awal untuk bertemu dengan saudara mereka yang telah menjadi warga desa. Namun berikutnya ternyata mereka pun ikut menetap dan kemudian bekerja sebagai petani atau pedagang. Memang orang Bugis dikenal sangat *mobile*, mereka tidak hanya berdiam menetap saja di desa melainkan juga bergerak ke kota Palu dan wilayah lain yang dianggap potensial untuk mengembangkan kepentingan kegiatan ekonominya. Orang Bugis dan Kulawi ini kemudian dikenal dengan istilah setempat sebagai 'orang pendatang' karena memang berasal dari luar wilayah Palolo, bahkan luar provinsi. Mereka ini baru menyusul belakangan masuk ke desa Sintuwu.

Dapat dicatat sebenarnya orang Kaili, yang diperkirakan mencapai jumlah 60 persen dari 12 suku asli lainnya yang terdapat di provinsi Sulawesi Tengah, memiliki banyak varian suku seperti Kaili Ledo, Kaili Ija, Kaili Rai, Kaili Unde dan sebagainya (Sulaeman et al 1986: 15). Namun jumlah keseluruhan mereka yang disebut terakhir ini relatif sedikit. Hanya orang dari suku Kaili Tara dan Kaili Taa (untuk selanjutnya disebut Kaili saja) yang jumlahnya relatif banyak dan di antara mereka inilah yang antara lain menempati kedua desa Sintuwu dan Berdikari.

Sementara latar belakang proses migrasi penduduk ke desa Berdikari lebih mudah dipahami karena memang tanah di desa setempat relatif subur sehingga mengundang minat banyak orang untuk menempatinnya. Dimulai tahun 1960 oleh seorang dari suku Kulawi yang juga adalah aparat pemerintahan desa Ampere (desa tetangga) yang tertarik untuk merintis membuka kebun pada lahan yang masih berhutan dan kosong penduduk, yang kemudian diikuti oleh sanak saudaranya, dan begitulah seterusnya. Arus migrasi spontan tersebut pada gilirannya membentuk sebuah desa baru yang disebut desa Karawa Maluo. Namun kemudian nama desa ini berubah menjadi Berdikari oleh inisiatif tokoh perintisnya yang artinya desa yang

warganya mampu mengurus dirinya sendiri tanpa diberi bantuan oleh pemerintah. Ini sebuah simbol kebanggaan tersendiri.

Periode paling penting yang dilalui desa ini terjadi pada tahun 1965 saat masuk para transmigran suku Jawa yang ditempatkan pemerintah, lewat jalur institusi militer. Oleh warga desa perintis mereka diberi sebidang lahan untuk menampung 85 KK transmigran. Areal hunian mereka ini kemudian membentuk perkampungan kecil dan lalu berkembang menjadi sebuah desa terpisah dengan nama desa Bahagia pada tahun 1977. Tahun 1973 adalah awal masuknya pendatang suku Bugis. Dengan alasan merantau mencari penghidupan, berikutnya jejak mereka diikuti kaum kerabat lainnya yang sebelumnya sudah menetap dan berdagang di sekitar Palu dan Paiolo. Masuk awal 1980an jumlah suku Bugis makin banyak dan mereka ini banyak bermukim di pinggiran jalan Trans Palu-Palolo.

Sebelumnya tahun 1970an telah ada beberapa keluarga yang berasal dari Tana Toraja, Sulawesi Selatan yang berdomisili di desa Berdikari. Mereka umumnya adalah petani penggarap yang mengerjakan tanah pegawai sebuah institusi militer (Korem). Di antara mereka umumnya masih terikat pertalian kerabat. Saling mengajak seringkali menjadi alasan utama para pendatang, khususnya untuk mereka yang berasal dari suku Bugis. Sedangkan alasan karena dipanggil menggarap sawah dan kebun milik keluarga sering menjadi sebab masuknya para pendatang dari Tana Toraja. Suku-suku lain yang jumlahnya lebih kecil seperti Manado, Mori-Poso, Kaili umumnya masuk setelah desa ini telah lebih terbuka. Akhir 1980an misalnya adalah periode paling penting masuknya suku Kaili Daa dari desa tetangga Kamarora. Bukit Korah yang berlokasi di desa Berdikari dan sekaligus menjadi bagian dari kawasan hutan produksi terbatas yang dikuasai negara adalah lokasi bagi hunian utama suku Kaili tersebut. Mereka yang berjumlah kurang lebih 100 KK ini menghuni atas dasar hak pakai.

KARAKTERISTIK PENDIDIKAN DAN PEKERJAAN PENDUDUK

Di desa Berdikari latar belakang pendidikan sebagian besar warganya hanya tamat sekolah dasar saja (50 %), sebagian lain (30 %) di antaranya bahkan tidak tamat SD. Sisanya tersebar di kategori tamat SD, dan hanya sekitar 10 % saja di antaranya yang tamat SLTA. Sedangkan di Sintuwu data serupa tidak diperoleh, namun dugaan peneliti berdasarkan keterangan para pemuka masyarakat tampaknya keadaan dari segi pendidikan ini lebih buruk. Ini karena dominasi suku di desa Sintuwu adalah Kaili yang pada umumnya hanya berpredikat tidak tamat SD. Fasilitas pendidikan di desa Berdikari telah ada sejak bangku SD sampai dengan SLTA, sementara di desa Sintuwu hanya sampai SLTP saja.

Sementara pekerjaan mereka di kedua desa tersebut tercatat lebih dari 90 % adalah petani. Kategori petani terbagi atas petani pemilik dan petani penggarap. Di desa Sintuwu berdasarkan catatan monografi tahun 2000 jumlah petani pemilik tak lebih

dari 5 % saja, sementara sisanya hanya menjadi petani penggarap. Di desa Berdikari menurut catatan monografi desa tahun 2000 petani penggarap mencapai hampir 30 % saja, sedangkan sisanya adalah petani pemilik. Hanya sedikit saja di antara mereka yang selain bertani juga membuka usaha dagang misalnya dengan membuka warung di rumah. Mereka yang disebut terakhir ini biasanya adalah suku Jawa, Bugis, atau orang pendatang lainnya (non-Kaili). Bahkan di desa Berdikari orang-orang Jawa juga sudah mengembangkan ternak ayam kampung, walaupun dilakukan dengan cara dilepas saja tanpa kandang. Beberapa di antara mereka juga sudah membuka usaha jahitan pakaian di rumah kediamannya. Hal terakhir ini adalah salah satu contoh dari beragam usaha ekonomi rumahtangga yang umumnya dilakukan oleh penduduk suku pendatang.

MODA PRODUKSI MULTI SUKU DAN PENGARUHNYA PADA PENGELOLAAN SUMBER-SUMBER AGRARIA

Hal paling penting yang segera dapat kita nyatakan pada tipe desa 'asli' (desa Sintuwu) ialah moda produksi dominan yang mempengaruhi cara pengelolaan sumber-sumber agraria di desa setempat terutama mengacu pada kelompok suku Kaili, yaitu suku asli yang paling awal datang membuka desa dan memiliki warga dalam jumlah mayoritas. Sebaliknya pada tipe desa 'pendatang' (desa Berdikari) moda produksi dominan tidak ada karena masing-masing warga mengacu pada tradisi kelompok sukunya yang jumlah warganya relatif seimbang. Masing-masing suku datang menempati desa barunya praktis beruntun dalam jarak waktu yang satu sama lain relatif pendek.

Moda Produksi Suku Kaili dan Suku Asli Lainnya

Di kabupaten Donggala berdiam sekitar 12 (dua belas) suku asli yang besar di mana 3 (tiga) di antaranya menjadi suku paling menonjol karena kuantitasnya masing-masing adalah suku Kaili, suku Tomini, dan suku Kulawi. Permukiman suku Kaili terpusat di kecamatan Palolo yang seperti telah disinggung terdahulu sejak 2 (dua) dasawarsa yang lalu telah berkembang menjadi tujuan penting migrasi banyak orang. Walaupun demikian tidaklah terlalu sulit bagi kita untuk mengamati mana penduduk yang berasal dari suku asli dan mana suku pendatang.

Salah satu aspek pembedanya adalah moda produksinya. Suku-suku asli umumnya mengembangkan pertanian dengan tanaman utama padi ladang, jagung, dan umbi-umioian. Selain itu sebagian besar hasil panen pertanian mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumahtangganya sendiri. Tenaga kerjanya dikerahkan dari unsur-unsur keluarga dan kerabat luas. Sedangkan suku-suku pendatang seperti Bugis misalnya lebih condong mengusahakan kebun kakao yang memiliki nilai jual tinggi di pasaran, dengan menggunakan tenaga kerja upahan. Sementara suku Jawa dan Sunda lebih banyak bergiat pada bercocok tanam padi di sawah dengan pengerahan tenaga yang imbalannya bagi hasil. Untuk mendapatkan

kebutuhan uang tunai maka usaha paling penting yang hampir dilakukan oleh seluruh warga suku termasuk orang Kaili adalah masuk kawasan hutan mengambil berbagai macam hasil hutan seperti rotan, kayu, dan sebagainya.

Pesta Adat dan Relasinya Terhadap Moda Produksi

Bagi rumahtangga suku Kaili dan juga kebanyakan suku asli lainnya kebutuhan pengeluaran biaya mereka relatif banyak, terutama jika dihubungkan dengan tuntutan tradisi yang mewajibkan mereka menyelenggarakan berbagai pesta-adat. Tujuan pesta-pesta adat tersebut adalah berkaitan dengan upacara memohon keselamatan pada Zat yang Maha Kuasa untuk menandai peralihan tahap siklus kehidupan seorang individu sejak dari memperingati hari kelahirannya hingga kematiannya. Bahkan untuk hari kematian mereka bisa melakukannya dengan pesta-pesta besar berturut-turut mulai menginjak hari pertama hingga ketujuh, keempat puluh, dan seterusnya pada hari-hari lain yang dianggap keramat, dengan tamu pengunjung yang meliputi banyak kepala keluarga baik kerabat maupun tetangga sedesa. Sangatlah dianjurkan oleh adat agar pematangan hewan sapi hendaknya dapat menyertai setiap peringatan terutama untuk upacara kematian. Bahkan di masa lalu, sekitar tahun 1960an sebenarnya masih berlaku ketentuan adat yang melarang penguburan jenazah apabila belum ada seekor sapi pun yang siap dipotong.

Berbagai biaya pesta adat sebenarnya sudah banyak harus dikeluarkan sejak beberapa hari di tahap persiapan upacara. Dalam hal ini pihak tuan rumah misalnya sudah harus memberi makan bagi tamu-tamunya yang datang membantu, khususnya yang bekerja membangun panggung dan pondok pesta. Bersamaan dengan itu tuan rumah biasanya akan berusaha agar sedikitnya ia dapat memotong 1 (satu) ekor babi setiap harinya sebagai sajian lauk-pauk yang disuguhkan kepada para tetamunya. Jumlah tamu-tamu ini dapat mencapai puluhan orang per hari secara bergantian dan berlangsung sampai 3-4 hari menjelang hari pesta dilangsungkan.

Gambaran di atas terutama berlaku untuk pesta adat yang dilangsungkan oleh keluarga yang berasal dari lapisan sosial menengah-atas. Sedangkan untuk keluarga yang berasal dari lapisan menengah-bawah, tentu saja skalanya akan lebih kecil sesuai kemampuan mereka. Berdasarkan uraian di atas ada beban ekonomi yang harus ditanggung oleh masing-masing keluarga pada suku asli, untuk memenuhi tuntutan adatnya yang sarat dengan keharusan menyelenggarakan berbagai pesta tersebut.

Dapat dipastikan semua orang Kaili dan suku asli lainnya akan berusaha menabung harta benda agar mereka sanggup memikul biaya kebutuhan berbagai ritual tersebut. Tabungan yang paling umum mereka tanamkan adalah dalam bentuk tanah, ternak babi, dan sapi yang siap dijual apabila tiba waktunya diperlukan. Namun untuk tabungan dalam bentuk hewan ternak ini jumlahnya tak terlalu banyak. Sementara

Moda Produksi dalam Pengelolaan Sumber Agraria

tabungan dalam bentuk uang tunai hampir tidak pernah mereka pertimbangkan. Uang tunai hasil bertani mereka belanjakan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari atau tidak jarang dipakai sekedar untuk membeli kesenangan saja. Sebagai contoh sesudah mendapatkan uang tunai dari hasil panen, kaum laki-laki dalam hal ini, mereka gemar mengkonsumsi minuman keras atau sekedar pergi berjalan-jalan mengunjungi teman atau kerabat di desa lain untuk beberapa hari lamanya yang tentu harus ada ongkos yang dikeluarkan.

Sebenarnya tanaman komoditi yang banyak diusahakan orang-orang Kaili dan suku asli lainnya di kebun atau ladang praktis hanya bernilai jual rendah saja di pasaran. Akibatnya tanah miliklah yang lebih sering mereka andalkan untuk mendapatkan uang tunai dengan cara dijual kepada suku lain, khususnya Bugis. Adalah menarik untuk mengamati kenyataan bahwa jika lahan yang mereka kuasai hanya tinggal menyisakan pekarangan rumah atau sebidang lahan pertanian yang sempit saja, maka sebisa mungkin lahan tersebut akan mereka gadaikan saja guna memperoleh uang tunai. Namun jika cara ini pun sulit mereka lakukan maka terpaksa lahan tersebut akan mereka jual juga. Berikutnya mereka akan masuk ke kawasan hutan di sekitarnya baik itu hutan produksi (masyarakat desa Berdikari) atau TNLL (masyarakat desa Sintuwu) untuk mencari lahan pengganti. Gejala ini sekaligus menunjukkan bahwa tanah pada suku Kaili khususnya, bukanlah benda yang terlalu penting dalam konteks pola pewarisan mereka. Apabila orangtua meninggal tanah tidak dibagikan pada anak-anaknya melainkan digilirkan dengan sistem per jumlah kali tanam/panen.

Ada suatu perkembangan yang patut diungkapkan di sini yaitu sejak masuk Zending, dalam hal ini dilakukan oleh lembaga Bala Keselamatan (Salvation Army), ke desa-desa maka orang Kaili dan juga orang-orang dari kelompok suku lainnya diarahkan untuk membentuk apa yang disebut sebagai kelompok kerja Belo Singgani (kebaikan bersama). Kelompok ini berintikan anggota jamaah gereja yang kegiatan utamanya adalah menggalang kerja gotong royong dalam mengolah lahan milik mereka secara bergilir. Bagi mereka telah menyelesaikan pekerjaannya kemudian akan menerima imbalan bayaran uang tunai dari si pemilik lahan selain memperoleh jamuan makanan ringan dan minuman, dan demikianlah seterusnya pergiliran kerja dilakukan. Seluruh imbalan uang yang diterima dianjurkan oleh pemimpin mereka agar disimpan di kas tabungan kelompok yang dapat dicairkan kembali apabila ada di antara anggota yang memerlukannya. Termasuk dalam hal ini untuk membiayai sebagian kebutuhan dana penyelenggaraan pesta-pesta adat.

Namun demikian kehadiran kelompok kerja ini belum mampu berperan banyak dalam meringankan beban biaya pesta adat. Hal ini karena total biaya untuk penyelenggaraan pesta adat seringkali jauh lebih besar lagi. Apalagi ada tradisi bahwa makin banyak hewan ternak sapi atau babi yang diptong, maka kehormatan keluarga yang bersangkutan akan semakin tinggi pula.

KELOMPOK KERABAT DAN PERANANNYA

Keeratan dan kesetaraan kerjasama antar sesama anggota kelompok kerabat (*kingroups*) patut kita catat sebagai bentuk ikatan sosial yang paling berperan dalam meringankan beban rumah tangga/keluarga. Dalam hal ini mereka dapat menyokong pengadaaan dana dan tenaga yang dibutuhkan seseorang dalam penyelenggaraan pesta-pesta adat. Mereka saling mengulurkan tangan dalam relasi yang saling menguntungkan.

Di desa Sintuwu undangan dengan nama 'rokok adat' yang meletakkan 1 (satu) bungkus rokok di atas piring kecil, yang kemudian dibawa berkeliling oleh pengundang ke rumah para kerabatnya adalah lazim dikenal dalam rangkaian acara pesta (perkawinan). Rokok disini melambangkan 'teman' pemberi nikmat di kala mereka akan saling bertukar cerita mengungkapkan rasa keakraban satu sama lain. Sekaligus undangan tersebut adalah juga simbol yang mengingatkan kewajiban para kerabat undangan agar mereka tidak lupa membawa buah tangan seperti beras 2 (dua) liter yang biasanya diserahkan saat mereka datang ke pesta.

Di samping itu mereka mengembangkan pula tradisi yang disebut dengan istilah 'kemanisan hati' yaitu suatu ungkapan agar para kerabat dekat khususnya terlibat aktif memberi bantuan tenaga maupun biaya kepada keluarga yang punya hajat bahkan sejak dimulai tahap persiapan pesta. Dimaksudkan dengan kerabat dekat disini adalah berasal dari batas hubungan-hubungan kekerabatan (*kinship relations*) tertentu seperti saudara sekandung, paman, dan kakek-nenek dari pihak suami dan istri, serta kerabat lain yang berasal dari batas-batas pergaulan kekerabatan (*kinship affiliations*) pada umumnya. Makin tinggi lapisan sosial sebuah keluarga biasanya semakin luas pula batas-batas hubungan dan pergaulan kekerabatan mereka.

Undangan kedua berikutnya adalah berupa kertas tertulis, yang sekaligus mengindikasikan agar sebaiknya para kerabat yang datang ke pesta sekaligus membawa uang secukupnya untuk membantu meringankan biaya si empunya hajat. Sebaliknya bagi mereka (tetangga atau kerabat jauh) yang diundang dengan lisan biasanya tidak diwajibkan untuk membawa bekal uang, kecuali sebatas kesukarelaan saja. Gambaran di atas adalah potret yang terjadi pada suku Kaili. Namun praktek serupa sebenarnya juga terjadi pada suku-suku lain, terutama saat menghadapi pesta perkawinan dan pesta kematian. Berdasarkan peranan kelompok kerabat yang demikian itu apalagi seperti yang menyolok terlihat pada kehidupan orang Kaili khususnya tampak istilah kelompok kerabat berkorporasi (*corporate kingroups*) seperti banyak diungkap dalam kepustakaan antropologi sosial tepat digunakan di sini. Artinya kelompok kerabat seperti ini memiliki (a) suatu sistem norma tersendiri yang mengatur perilaku anggota kelompok; (b) memiliki suatu rasa kepribadian kelompok yang disadari semua anggotanya; (c) adanya aktivitas berkumpul berulang-ulang; dan (e) adanya suatu sistem hak dan kewajiban yang mengatur interaksi antar anggota kerabat (lihat Koentjaraningrat 1974).

SUKU PENDATANG

Suku pendatang paling utama di Sintuwu dan Berdikari adalah Bugis. Sementara di Berdikari suku pendatang terbesar berikutnya adalah Toraja, Manado, Poso, Jawa, dan Sunda. Orang-orang suku pendatang pergi merantau ke kedua desa didorong oleh hasrat untuk mencari tingkat penghidupan yang lebih baik. Orang Bugis misalnya sangat menonjol dalam kegiatan ekonomi lokal, terutama sejak mereka mengusahakan tanaman kakao lebih ekstensif mulai 1980an. Nilai jual hasil kakao yang tinggi di pasaran menyebabkan orang-orang Bugis lebih tinggi tingkat kesejahteraannya dibanding suku-suku asli. Mereka juga bergerak di kegiatan usaha non-pertanian seperti membuka warung atau kios-kios yang menjajakan beragam barang dagangan di desa.

Berkaitan dengan pola hubungan orangtua dan anak pada suku Bugis sangatlah terlihat bagaimana orang tua sangat dituntut untuk berusaha sekuat tenaga agar mereka mampu memberikan bekal harta-benda dan asset lainnya yang berharga pada anak-anak mereka yang telah dewasa. Bahkan lebih luas lagi lingkupnya tiap-tiap orang Bugis sebenarnya dituntut untuk turut bertanggung jawab juga pada urusan kesejahteraan warga kerabat dekat lainnya, seperti pada kakak, adik, ataupun keponakan. Dari sini mudah diduga orang Bugis lebih memperhitungkan tingkat konsumsi rumahtangga mereka secara lebih ketat.

Di sisi lain patut dicatat pula bahwa sebagai perantau 'agresivitas-kerja' orang Bugis dan suku pendatang lainnya relatif menggejala lebih kuat dibandingkan warga suku asli. Orang Bugis khususnya sering terlibat dalam transaksi jual-beli sumber-sumber agraria dengan suku asli, untuk mengakumulasi lebih sejauh penguasaan sumber-sumber agraria guna memperluas perkebunan kakao dan sebagai asset berharga untuk anak-anak mereka kelak. Dalam kaitan ini boleh dikatakan moda produksi suku Bugis sudah mulai bertransformasi dari ciri 'komersial' ke arah 'kapitalis'. Keadaan ini telah mendesak warga suku asli untuk memasuki lebih dalam kawasan hutan TNLL, dan akibatnya mereka sering dituduh sebagai perambah hutan yang illegal. Dalam beberapa kasus keadaan ini sering juga diangkat ke tataran isu-isu politik lokal dengan menyebut orang-orang suku 'asli' sejak awal tidak pernah mendapatkan jatah (akses) sumber-sumber agraria dari pemerintah.

Hal lain yang patut dikemukakan dari kehadiran suku pendatang terlebih suku Bugis ialah, mereka cenderung hanya menjadikan desa perantauan sebagai basis kegiatan ekonominya. Dengan kata lain mereka tetap menempatkan daerah asal sebagai basis kehidupan sosial-kultural terutama seperti digambarkan oleh lapisan elitnya. Oleh sebab itu tidak jarang dijumpai rumah-rumah orang kaya suku Bugis di kedua desa perantauan itu kosong karena sedang ditinggal pemiliknya pulang kampung untuk waktu yang relatif lama. Hanya para kerabat yang berusia tua atau kurang mampu saja yang tetap tinggal di tempat sambil menunggu usaha warung atau kios milik kerabat kaya tadi. Demikian pula dengan tanah-tanah pertanian yang sebagian di antaranya mereka titipkan pada kerabat dan sebagian lainnya dengan cara

mengupah orang-orang dari suku Kaili atau suku asli lainnya yang bersedia untuk menjaga dan memeliharanya.

Dalam kaitan hal di atas memang timbul semacam struktur hubungan produksi yang secara umum lebih menempatkan orang suku pendatang sebagai majikan dan orang suku asli sebagai tenaga upahan. Perihal ini mulai muncul reaksi dari tokoh-tokoh elit suku asli yang melihat gejala ini sebagai wujud ketimpangan struktural. Mereka mulai merasa kedudukan dan peranannya di tengah-tengah kehidupan komunitas desa mulai tersingkir, apalagi manakala orang suku asli harus terdesak hingga tak lagi memiliki tanah karena dijual. Mereka ini mulai menyebut-nyebut juga siapa 'kami' dan siapa 'mereka' dalam konteks yang mengarah pada sekat-sekat primordialisme.

SENTIMEN KOLEKTIF DAN PEMBENTUKAN FORMASI SOSIAL 'KOMERSIAL'

Dalam karakter moda produksi masing-masing suku yang condong eksklusif mudalah dipahami orang-orang suku Kaili dan suku asli lainnya tidak cukup intens berupaya mengembangkan relasi sosial yang resiprokal dengan orang-orang di luar sukunya kecuali sebatas bentuk bertukar perlambang-perlambang budaya simbolistik belaka. Demikian pula sebaliknya suku pendatang pun tidak pro-aktif mengembangkan relasi sosial yang serupa.

Dalam hal ini pesta-pesta adat tak cukup mampu menjembatani kebutuhan pengembangan relasi sosial yang berlingkup lintas suku. Dengan demikian wujud pertukaran simbol-simbol budaya di antara warga kelompok-kelompok suku lewat pesta adat mereka maupun lewat perayaan peristiwa nasional lainnya yang diselenggarakan oleh pemerintah desa hingga kini belum berhasil menguatkan sentimen kolektif. Akibatnya pembentukan ikatan komunitas desa yang *solid* dengan formasi sosial 'stabil' di dalamnya pun belum tampak.

Bahkan ada kecenderungan lebih jauh yaitu masing-masing suku, terutama di desa Sintuwu, menguatkan ikatan primordialismenya dengan membentengi wilayah permukiman mereka sebagai teritorial 'eksklusif' berbasis ikatan suku. Di desa Sintuwu permukiman suku Bugis berada di pusat desa, sedangkan suku Kaili berada di pinggiran sungai Gumbasa. Sejak terjadi banjir besar pada beberapa tahun terakhir yang mengikis wilayah permukiman kelompok suku Kaili mereka berangsur-angsur mulai bergerak ke dalam desa, namun tetap saja kampung permukiman mereka tidak bercampur dengan orang dari suku lain. Sementara suku Kulawi dan suku Bugis umumnya bermukim di sepanjang pinggiran hutan berbatasan kawasan hutan namun tetap dengan pola permukiman yang terpisah. Eksklusivisme pola permukiman kelompok-kelompok suku ini makin dikokohkan dengan tanda-tanda rumah mereka yang khas yang melambangkan asal suku.

Sementara di desa Berdikari, suku Kulawi dan suku Bugis hadir sebagai kelompok yang relatif paling besar di antara suku-suku lain. Namun seperti juga pada desa Sintuwu mereka menempati lokasi permukiman yang terpisah, walaupun sebenarnya berada pada lokasi dusun yang sama. Dengan karakter budaya masing-masing suku asli maupun pendatang yang tetap kokoh pada sistem normatif etniknya wajar jika sentimen kolektif di desa Berdikari tidak pernah terbentuk dengan cukup bermakna. Implikasinya pengaturan desa termasuk untuk wilayah pinggiran kawasan TNLL di desa Sintuwu dan kawasan hutan produksi terbatas di desa Berdikari sulit dilakukan karena tidak adanya inti budaya yang mawadahi kepentingan kelompok suku secara kolektif. Masing-masing kelompok suku asli maupun pendatang mengusahakan pertanian mereka dengan sistem norma lingkungannya sendiri-sendiri. Bagi suku-suku asli yang usaha pertanian ladang atau kebun mereka masih mengandalkan tanaman pokok dengan nilai jual rendah di pasar ternyata secara tidak langsung telah membawa pemiliknya lebih mudah melepaskan tanahnya untuk dijual pada pihak lain.

Sebaliknya dengan suku Bugis dan beberapa suku pendatang lainnya, karena mereka bertani dengan tanaman pokok yang berharga jual relatif tinggi maka mereka justru terdorong mengakumulasi penguasaan sumber-sumber agraria dengan cara membeli secara sistematis tanah-tanah milik suku asli. Pada titik ini, baik suku asli maupun pendatang sesungguhnya tidak menampakkan secara nyata sikap untuk mengikatkan emosi diri mereka lebih kuat pada tanah di kedua desa setempat. Secara tak langsung berarti mereka hanya memandang desa setempat tak lebih sebagai wilayah *frontier* atau *open access* belaka. Maknanya setiap orang dapat mengambil keuntungan ekonomi dari wilayah yang bersangkutan tanpa harus memperdulikan bagaimana dengan aspek keberlanjutan (*sustainability*) dan daya dukung lingkungan setempat.

Agak berbeda dengan sikap di atas pada orang-orang suku Jawa dan Sunda yang datang jauh dari pulau Jawa, moda produksi yang dikembangkan dan ikatan emosional dengan desa dan lingkungan setempat lebih muncul. Apalagi usaha pertanian padi sawah yang mereka lakukan relatif lebih menuntut perhatian dan ketekunan kerja dibandingkan dengan jenis usaha pertanian lainnya yang dikelola suku lain. Artinya, seperti yang mereka akui sendiri perlahan-lahan timbul ikatan emosional lebih dalam pada diri mereka atas desa (Berdikari) tempat tinggal mereka. Hanya secara jujur diakuinya pula karena ada pengaruh luar yang tinggi maka orang-orang suku Jawa dan Sunda tak jarang tergiur pula untuk turut masuk dan mengambil hasil hutan yang perolehan nilai ekonominya tinggi dan relatif mudah dikerjakan.

Singkat kata adalah pengaruh moda produksi suku Bugis di desa Sintuwu justru menguat secara sepihak, sehingga cenderung mendominasi penguasaan dan pengusahaan sumber-sumber agraria di lingkungan setempat. Tanah penguasaan mereka terus makin meluas dengan pengusahaan kakao yang relatif mendatangkan keuntungan besar sehingga menciptakan tingkat kesejahteraan lebih menyolok

dibandingkan suku-suku asli. Pada lima tahun terakhir sangat terasa ekspansi lahan orang-orang suku Bugis hasil pembelian dari orang-orang suku asli tersebut. Akibatnya orang-orang dari suku terakhir ini terus terdesak sehingga banyak di antaranya yang membuka lahan di dalam kawasan hutan TNLL (bandingkan dengan involusi pertanian di Jawa, Geertz 1983).

Sejajar dengan itu tradisi dan praktek kehidupan orang-orang Kaili dan suku-suku asli lainnya cenderung 'konsumtif'. Mereka hampir tidak mengenal tradisi pewarisan harta-benda dalam wujud tanah. Pola pengusahaan sumber-sumber agraria mereka baik di ladang, kebun atau kawasan hutan cenderung berada pada konteks tradisi transisi antara karakter yang biasa dimiliki kelompok berburu-meramu (*hunting band*) dan komunitas berladang berpindah (*shifting cultivation community*) (bandingkan Koentjaraningrat 1974).

Dalam hal ini walaupun hak-hak kepemilikan individual (*individual property right*) sudah dikenal dan memperoleh pengakuan sosial, namun tanah masih lebih dipahami sebagai sumber matapencarian belaka, jadi terbatas sebagai sebuah media instrumental saja. Oleh karena itu manakala ada kesempatan untuk menjual tanah maka rupanya ini tak sulit mereka lakukan.

FORMASI SOSIAL 'KOMERSIAL/KAPITALISTIK' DAN IMPLIKASINYA TERHADAP STABILISASI LINGKUNGAN

Sebagaimana telah diuraikan terdahulu masing-masing suku tampak hidup dengan inti budayanya sendiri. Hal demikian tentu saja tidak kondusif dalam upaya membentuk sentimen kolektif lintas suku sebagai landasan menuju ikatan sosial desa. Belum ada perekat sosial yang mampu menjembatani kepentingan antar kelompok suku secara sinergis. Sebagai kelompok sosial yang berciri agraris, maka tidak terbentuknya inti budaya kolektif sebagai acuan norma seluruh warga komunitas sampai taraf tertentu telah memposisikan desa dan wilayah sekitarnya tetap condong sebagai '*frontier area*' atau '*open access*'. Implikasinya bagi suku yang kuat modalnya maka peluang lebar untuk menguasai lebih banyak sumber-sumber agraria jelas akan berada pada diri mereka. Sebaliknya pada kelompok-kelompok suku lain yang lemah kemampuan modalnya, jelas mereka akan terdesak ke luar lebih jauh dari pusat desa. Pada gilirannya ini akan mendorong mereka yang disebut terakhir ini untuk masuk kawasan hutan membuka lahan baru.

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa masing-masing kelompok suku apapun jenis tanaman pokok usaha pertaniannya tetap akan bersifat ekstensif bahkan ekspansif terhadap lingkungannya. Padahal dilihat dari akar budayanya masing-masing kelompok suku baik asli maupun pendatang sesungguhnya memiliki sistem norma lingkungan yang memuat kearifan lokal. Sebagai contoh kita dapat merujuk pada kelompok suku Kaili yang tinggal di Kecamatan Marawola, Sulawesi Tengah

Moda Produksi dalam Pengelolaan Sumber Agraria

mengembangkan pola pengaturan lingkungan yang tercermin dalam usaha pertaniannya, sebagai berikut (Ruwiati et al 1998: 50-51):

1. *Petoo*: yaitu wilayah yang berada dalam penguasaan anggota suku yang berisi kebun, permukiman, hutan bekas kebun, dan hutan primer.
2. *Vana*: hutan rimba untuk berburu dan mengambil hasil hutan yang khusus untuk anggota suku saja.
3. *Pengale*: hutan lebat milik kolektivitas anggota suku. Areal ini dibiarkan tetap menjadi hutan berdasarkan pertimbangan ekologis misalnya karena di dalamnya terdapat sumber air, bertopografi miring, atau karena hutan ini juga adalah tempat keramat bagi seluruh anggota suku.
4. *Kaore, Oma, dan Ova*: hutan bekas kebun yang sedang diistirahatkan oleh pemilikinya dalam waktu lama.

Lebih jauh kita juga menemukan bahwa secara umum semua kelompok suku mengenali ungkapan "jangan sorong tanah orang lain", yang artinya adalah setiap individu tabu mengambil tanah yang merupakan hak individu lain. Hak individu lain ini juga dapat dimaknai sebagai hak negara, suatu hak yang tak boleh diganggu. Namun dalam realitas yang kita jumpai di kedua desa Sintuwu dan Berdikari adalah, moda produksi masing-masing kelompok suku cenderung mengarah kepada fungsi pemenuhan ekonomi semata yang kurang memperhatikan aspek lingkungan.

Nilai-nilai lokal tidak menjalani proses pembumian atau mendapatkan tafsir ulang yang kontekstual dengan keperluan memelihara sumber-sumber agraria yang berkelanjutan. Tradisi hidup kelompok suku asli misalnya tetap mengacu pada moda produksi lama, padahal konteks ekonomi-politik di desa baru (Sintuwu dan Berdikari) jauh berbeda. Artinya, mereka tetap mengembangkan praktek-praktek hidup yang tidak berubah, seperti tetap mengandalkan sumber matapencaharian dari usaha pertanian yang condong untuk memenuhi konsumsi diri sendiri (subsisten). Sementara kebutuhan uang tunai untuk berbagai macam keperluan hidup, termasuk penyelenggaraan pesta adat makin dirasakan mahal. Akibatnya lahan milik menjadi pilihan paling dekat untuk diperjual-belikan, dan ini jatuh pada anggota kelompok suku lain yang bermodal kuat. Situasi ini makin meminggirkan posisi kelompok suku asli dalam konstelasi kehidupan sosial di desa baru, dalam hal ini di Sintuwu.

Sejajar dengan itu kita juga menemukan betapa moda produksi kelompok suku asli dan sampai derajat tertentu juga pada kelompok suku pendatang malahan terdesak ke belakang. Moda produksi masing-masing kelompok suku justru saling berhadapan dalam tarik-menarik kepentingan. Wajar jika pada gilirannya mereka juga tidak berhasil mengembangkan relasi sosial lintas suku yang mendorong lahirnya sentimen kolektif dan lebih lanjut tumbuhnya ikatan sosial desa. Di sini pula sesungguhnya tahap krusial bagi pembentukan formasi sosial 'stabil' tidak berhasil dicapai, walaupun sesungguhnya momen optimal saat awal mereka datang menempati desa pernah terjadi.

Pada saat itu baik pemerintah daerah dan kelompok masyarakat migran khususnya telah bersama-sama mengkonsolidasikan diri bagi perintisan pendirian lembaga-lembaga desa di aras dusun dan desa. Bersama-sama mengembangkan musyawarah lintas suku untuk memecahkan persoalan-persoalan yang harus mereka selesaikan di desa mereka yang baru itu.

Namun kini dengan terus vakumnya pranata sosial (*social institution*) dan organisasi sosial (*social organization*) di aras desa, maka di kedua desa terlebih di Sintuwu sulit diharapkan tumbuhnya sentimen kolektif dan ini berarti kontrol sosial tidak akan berjalan pula. Perayaan pesta adat di lingkup masing-masing suku ternyata tidak berkembang hingga mampu menembus dinding pemisah sosio-kultural antar kelompok suku. Pesta-pesta adat tetap merupakan peristiwa sosial eksklusif untuk tiap-tiap kelompok suku. Akibatnya mereka tetap saja hidup berdasarkan sistem norma lingkungan masing-masing yang ternyata lebih memosisikan desa-desa baru di Sintuwu dan sampai taraf tertentu juga di Berdikari hanya sebagai wilayah *frontier* atau *open access* belaka.

MODA PRODUKSI SAWAH

Adalah menarik untuk mengamati gejala yang agak berbeda dengan gambaran di atas, yaitu pada suku Kulawi yang menetap di desa Berdikari. Seperti telah diuraikan terdahulu suku itu mengusahakan sumber matapencariannya dari pertanian sawah basah. Usaha pertanian ini jelas sangat menuntut perhatian dan ketekunan individu petaninya hampir di semua tahapan kegiatan, dari mulai penanaman hingga pemanenan.

Di luar itu mereka juga dituntut untuk bergiat secara kolektif membangun dan memelihara infrastruktur fisik guna mendapatkan dan menjamin aliran air irigasi, bergotong-royong memberantas hama tikus, dan banyak kegiatan kolektif lainnya. Dalam kaitan inilah penting dicatat implikasinya pada ikatan sosial desa. Walaupun kegiatan tolong-menolong sebagian masih berjalan di lingkup kelompok suku saja, namun jelas sejumlah interaksi intensif dengan anggota kelompok suku lain diperlukan. Ini disebabkan pekerjaan membangun lahan sawah basah yang beririgasi permanen misalnya jelas memerlukan pembangunan dan pengaturan berlingkup desa.

Atas dasar itulah kita dapat melihat di desa Berdikari sentimen kolektif yang menjadi dasar ikatan sosial desa menjadi lebih terasa. Sistem norma lingkungan yang dikembangkan suku Kulawi ini dalam kenyataannya turut menyumbangkan dorongan penting bagi pembentukan formasi sosial yang menyumbangkan 'stabilitas lingkungan'. Namun demikian perlu kita akui bahwa praktek pembukaan lahan di dalam kawasan hutan di sekitar desa masih tetap saja berlangsung. Walaupun sebenarnya gejala ini terjadi berkat anggapan bahwa kawasan hutan sekitar desa

Berdikari adalah wilayah bebas yang boleh dimanfaatkan oleh siapa pun (*open acces*).

Ringkas kata kelompok suku Kulawi sedikit-banyak telah menyuburkan situasi dan kondisi bagi terbangunnya ikatan sosial desa lintas suku. Ikatan sosial desa inilah yang di waktu mendatang diharapkan mendorong terjadinya proses pembentukan formasi sosial 'stabil' yang penting untuk peningkatan kesejahteraan komunitas lokal dan keberlanjutan sumber-sumber agraria.

KESIMPULAN

Perkembangan desa Berdikari dan terlebih lagi desa Sintuwu masih mencirikan kehidupan yang terkotak-kotak dalam eksklusivisme suku. Ini ditunjukkan antara lain oleh permukiman fisik mereka yang sejak awal tersekat-sekat dalam kelompok-kelompok suku. Dalam konteks studi ini gejala eksklusivisme ditunjukkan oleh formasi sosial 'stabil' yang mensinergikan moda produksi masing-masing kelompok suku secara lebih harmonis. Ini penting agar cara pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dan pengelolaan sumber-sumber agraria yang dikuasai komunitas tersebut senantiasa memperhatikan aspek keberlanjutannya.

Di desa Sintuwu moda produksi pada masing-masing kelompok suku mewujudkan dalam pilihan tanaman pokok yang berbeda. Kelompok suku asli dengan jagung, kopi yang sebagian berorientasi pada kebutuhan rumahtangga dan sebagian lagi untuk pasar lokal dengan nilai jual relatif rendah. Sementara kelompok suku pendatang khususnya Bugis dengan tanaman pokok kakao yang berorientasi pada kebutuhan ekspor sehingga nilai jualnya relatif tinggi. Perbedaan moda produksi yang berbeda ini pada gilirannya menyebabkan kelompok suku pendatang lebih mendominasi aktivitas ekonomi lokal (tampil sebagai formasi sosial), misalnya dengan membuka warung, mengisi pasokan pasar dengan bahan-bahan kebutuhan sehari-hari, dan sebagainya. ini semua berakibat muncul kesenjangan sosial yang cukup menyolok antara kelompok suku asli dan pendatang.

Sejajar dengan itu terlihat bahwa kelompok suku asli merasa tidak terlalu terikat penuh dengan lahan miliknya. Alasannya selain sifat usaha pertanian mereka tidak menuntut pengelolaan intensif juga karena lahan milik hanya dimaknai sebatas fungsi *survival* belaka. Bahkan tidak jarang lahan hanya diperlakukan sebatas komoditas yang siap diperjual-belikan terutama apabila mereka memerlukan dukungan dana (uang tunai) untuk perayaan pesta-pesta adat seputar siklus kehidupan. Dapat kita amati bahwa nilai gengsi sosial melekat secara langsung pada besar-kecilnya skala perayaan pesta-pesta adat tersebut, sehingga seorang atau keluarga-keluarga tentu berusaha sekuat mungkin untuk merayakannya dengan skala relatif besar.

Sementara kelompok suku pendatang, utamanya Bugis makin terdorong ekspansif dengan membeli lahan-lahan baru dari suku-suku asli bagi tanaman kakao mereka yang memiliki nilai tinggi di pasar. Keadaan demikian menjadikan sumber-sumber agraria potensial di desa Sintuwu khususnya terkonsentrasi pada warga kelompok suku Bugis. Sebagai akibat lanjutan warga kelompok suku asli tak jarang harus pergi masuk kawasan hutan untuk membuka lahan baru pengganti lahan lama yang telah mereka jual. Singkat kata yang terjadi di desa Sintuwu adalah suatu pengerasan moda produksi masing-masing kelompok suku yang satu sama lain bersifat eksklusif sehingga 'instabil'. Artinya cara memenuhi kebutuhan ekonomi mereka praktis mengabaikan nilai penting keberlanjutan lingkungan, dimana sumber-sumber agraria dikuasainya.

Berbeda dengan desa Sintuwu, di desa Berdikari suku Kulawi mengembangkan usaha pertanian sawah basah yang secara fisik menuntut pengelolaan intensif. Untuk mendukung keberlanjutan usaha pertanian ini sudah tentu mereka memerlukan dukungan kegiatan yang bersifat kolektif. Pembangunan infrastruktur fisik saluran irigasi dan kegiatan pemeliharannya sebagai contoh, mau tidak mau menuntut mereka untuk mengembangkan interaksi lintas suku yang menyeluruh hingga ke aras desa dan wilayah sekitarnya. Proses ini langsung atau tidak langsung telah menumbuhkan nilai ikatan tanah dan sentimen kolektif berskala desa yang lebih kuat. Hal inilah yang pada gilirannya menjadi formasi sosial yang kondusif untuk proses penciptaan 'stabilitas lingkungan'.

DAFTAR PUSTAKA

- Geertz, Clifford (1983) *Involusi Pertanian: Proses Perubahan Ekologi di Indonesia* (diterjemahkan oleh S. Supomo). Bhratara Karya Aksara. Jakarta.
- Kirk, Michael (1999) *Land Tenure, Technological Change and Resource Use: Transformation Processes in African Agrarian Systems*. Peter Lang. Berlin.
- Koentjaraningrat (1974) *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Dian Rakyat Press. Jakarta.
- Li, Tania Murray (1999) *Transforming the Indonesian Upland: Marginality, Power and Production*. Harwood Academic Publishers. Germany.
- Lounela Anu dan Yando Zakaria (ed.). (2002) *Berebut Tanah: Beberapa Kajian Berperspektif Kampus dan Kampung*. Insist, Jurnal Antropologi UI, Karsa. Yogyakarta.
- Petras, James F (ed.). (1984). *Capitalist and Socialist Crisis in The Late Twentieth Century*. Rowman & Allanheld, Publishers. New Jersey.
- Ruwiatuti, Maria et al (1998) *Destruction of Indigenous People Land Rights*. KPA Press. Bandung.
- Soetarto, Endriatmo (2004). *Culture Core of Multi Ethnic Groups and Management of Local Environment Sourcess*. Storma Discussion Paper No 20, University of Goettingen Germany.

Moda Produksi dalam Pengelolaan Sumber Agraria

Wolff, Richard D and Stephen A. Resnick (1987) *Economics: Marxian versus Neoclassical*. John Hopkins University Press. Baltimore, England.

-
- ¹ Karangan ini ditulis ulang dan merujuk pada karya penulis pada *discussion paper no 20. Storma Project*, University of Goettingen Germany, 2004.
 - ² Para *scholar* Marxian condong membedakan moda produksi pada 2 (dua) aspek di dalamnya, yaitu pertama yang disebut kekuatan produksi (*force of production*) dan hubungan produksi (*relation of production*). Kekuatan produksi dalam konteks ini berhubungan dengan pemanfaatan alat-alat produksi, termasuk tanah sebagai salah satu sumber agraria. Sementara hubungan produksi berkaitan dengan sifat penggunaan tenaga kerja (kekeluargaan atau transaksional). Dari dua elemen tersebut maka artikulasi moda produksi dapat dipilah-pilah atas ciri 'subsisten', 'komersil', dan 'kapitalis'. Dua ciri terakhir ini berorientasi ke pasar sementara yang disebut pertama berorientasi ke usaha memenuhi kebutuhan rumahtangga sendiri. Dalam moda produksi 'komersial' dan terutama 'kapitalis' maka alat-alat produksi tidak semata-mata tanah, melainkan mencakup pula tenaga kerja, dan modal (uang). Jadi berbeda dengan moda produksi subsisten yang hanya bertumpu pada basis tanah belaka (Bandingkan Wolff and Resnick 1987 dan Petras 1984).
 - ³ Dimaksudkan dengan formasi sosial (*social formation*) adalah gejala dimana dua atau lebih moda produksi hadir bersamaan dalam masyarakat dan salah satu moda produksi mendominasi lainnya. Formasi sosial ini pada gilirannya menggerakkan suprastruktur (nilai dan aturan) suatu komunitas sosial.